

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI PAPUA

**Sekretariat: Jl. Kesehatan No. 4, Dok II Atas
Jayapura 99112, Tel. 534993/ 533092, Fax. 536427**

No : 005/BD/PGGP/05/2.7

Hal: Surat Gambala mengenai Pemilihan Kepala-kepala Daerah di Papua

Kepada Yang terhormat

Seluruh masyarakat di Tanah Papua

Salam sejahtera,

Sejak tahun 2004 yang lalu, kita mengalami perubahan yang amat berarti dalam tata cara penyelenggaraan pemerintahan di negara kita. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, kita memiliki hak untuk memilih secara langsung wakil-wakil rakyat, presiden serta wakil presiden seturut hati nurani, kejernihan akal budi dan keyakinan politis pribadi kita masing-masing. Mulai pertengahan tahun 2005 ini, rakyat di berbagai kabupaten dan provinsi akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang no. 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kita menyambut baik wujud demokrasi itu yang memungkinkan kita semua turut menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin daerah kita. Peluang ini hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Meskipun pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) oleh seluruh warga daerah merupakan ungkapan demokrasi yang patut didukung, namun tetap ada perasaan cemas dalam menghadapi peristiwa demokrasi itu. Telah menjadi keprihatinan kita bersama selama bertahun-tahun bahwa pemilihan kepala daerah sulit dilepaskan dari pengaruh uang, kekuasaan, kepentingan pribadi dan kelompok sendiri, entah keluarga entah partai. Praktik kotor yang kita kenal sebagai KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) itu, masih amat kuat dan tetap mencemari pemilihan yang akan datang kalau kita tidak waspada dan berani mengoreksi diri. Berikut kami rangkum berbagai laporan, informasi, pengaduan yang sampai kepada kami.

Di Wilayah Kepala Burung, masyarakat tidak tahu banyak mengenai aturan dan mekanisme PILKADA secara benar karena sosialisasi mengenai hal ini hampir tidak ada. Sosialisasi hanya dilaksanakan bagi kalangan pegawai dan pejabat pemerintah serta kalangan eksekutif sementara masyarakat pemilih tidak mendapatkan layanan informasi yang penting ini.

Di Pesisir Selatan Papua, pertarungan kekuasaan telah disertai dengan teror dan intimidasi yang dilakukan oleh para pendukung pasangan calon bupati/ wakil bupati dengan memeralat ikatan kesukuan dan keagamaan. Mencuri *start* kampanye juga telah dilakukan oleh berbagai tim sukses atau partai politik tertentu padahal Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak membenarkan hal ini. Akibatnya masyarakat yang tidak memiliki informasi lengkap tentang aturan pelaksanaan PILKADA dibingungkan dengan hal ini dan terpecah-belah.

Di Pegunungan Tengah, konflik elit politik setempat yang telah berlangsung dari masa lalu terus berlanjut di masa PILKADA ini. tidak jarang nama gereja-gereja diperalat untuk kampanye politik merebut suara. Bahaya praktik “tusuk suara atas nama masyarakat” tetap membayangi wilayah yang memiliki halangan alam yang besar.

Di Pesisir Utara suasana tidak jauh berbeda dengan wilayah lain di Papua. Sosialisasi mengenai tata cara pelaksanaan PILKADA tidak tersedia selengkapnya bagi masyarakat pemilih. Calon-calon dilaporkan belum melepaskan jabatan resmi mereka di instansi pemerintahan sebagai salah satu syarat yang dituntut Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejumlah pihak juga mencoba melakukan politik uang guna memenangkan pasangan calon tertentu tanpa menghiraukan aturan hukum yang ada.

Berkaitan dengan berita bahwa nama gereja-gereja dipakai untuk kampanye kelompok tertentu, kami menegaskan bahwa Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) tidak pernah memberikan persetujuan atau dukungan kepada salah satu kelompok politik karena PGGP sebagai persekutuan seluruh denominasi gereja di Papua tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis dan berada di atas kepentingan suku, golongan dan kelompok politik.

Berdasarkan pengalaman waktu lalu, kami mengajak seluruh masyarakat di Tanah Papua ini untuk merenungkan pokok-pokok ini sebagai pedoman dalam menentukan arah selanjutnya. Pokok-pokok itu adalah apakah rakyat kecil, khususnya kaum perempuan dan anak, selama ini dijamin dan dilindungi hak hidupnya? Apakah rakyat merasa aman dan nyaman dalam menjalani hidupnya sehari-hari dan melaksanakan tugasnya? Apakah sarana-sarana untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan, infra-struktur, lapangan pekerjaan, dan pusat kegiatan ekonomi, tersedia bagi setiap orang, khususnya yang miskin dan berada di tempat-tempat terpencil? Apakah hukum dan ketertiban umum ditegakkan?

Sebagai gembala umat yang tergabung dalam PGGP, kami menyerukan kepada seluruh masyarakat di Tanah Papua dari berbagai suku, bahasa, agama, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan dan keyakinan politik agar memakai haknya dengan memegang teguh prinsip-prinsip moral ini:

1. Memilih dengan hati nurani yang bersih untuk kepentingan umum dan bukan memilih karena dibayar atau karena prinsip “asal kami punya orang”;
2. Memilih orang yang diyakini akan mengusahakan kesejahteraan umum dan menegakkan hukum;
3. Memilih orang yang dikenal jujur, adil dan bebas dari KKN;
4. Memilih orang yang melindungi hak hidup rakyat yang lemah, miskin dan terpencil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kami bangga menyaksikan bahwa untuk setiap daerah pemilihan, ada banyak warga yang berani maju sebagai calon bupati/ walikota dan wakil bupati/ walikota. Banyaknya peminat dan calon memberikan peluang lebih besar bagi para pemilih untuk memilih yang terbaik. Kepada mereka yang bersaing untuk merebut suara masyarakat kami menyampaikan seruan:

1. Kuasa dan jabatan yang diperebutkan adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat;
2. Pemegang jabatan dalam PEMDA harus berani berkorban untuk rakyat dan bukan mencari untung untuk dirinya sendiri;
3. calon-calon yang bersaing dengan menyogok pemilih, atau mengatasnamakan agama dan suku untuk kepentingan politik,

telah menunjukkan bahwa mereka ini tidak layak menjadi pemimpin.

Akhir kata, kami menyerukan kepada setiap orang di Tanah Papua ini untuk menjaga ketertiban, keamanan dan perdamaian dalam seluruh proses pelaksanaan PILKADA ini agar upaya kita bersama membangun Papua sebagai Tanah Damai terus dimajukan.

Semoga segala niat yang baik mendapat berkat dari Sang Pemberi Damai, Tuhan segala kaum beriman.

Dikeluarkan di Jayapura
Tanggal 28 April 2005

Uskup Leo Laba Ladjar ofm
Ketua Umum

Pdt. Andreas Ayomi
Ketua I

Pdt. Lipiyus Biniluk
Ketua II

Pdt. Hermann Saud
Ketua III

J. Budi Hernawan ofm
Sekretaris Umum

Pdt. Ruben Weohau
Sekretaris I

Pdt. Petrus Done
Sekretaris III

Pnt. Eddy Pranata
Bendahara